

**Pisa Café (Jakarta), 7 Desember 2011**

**Media Briefing, perkembangan negosiasi COP 17 Durban (Africa)**

**Keterangan:**

**Narasumber Jakarta:**

1. **Berry Nahdian Forqan – Direktur Eksekutif WALHI**
2. **Yuyun Harmono – Koalisi Anti Utang**
3. **Among – KRUHA**

**Narasumber Durban:**

1. **Sri Ranti – WALHI**
2. **Diana Gultom – KRUHA**

**Narasumber Kalimantan Tengah:**

1. **Muliadi – Yayasan Petak Danum Kalimantan Tengah**

**Fasilitator: Teguh Surya – WALHI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Teguh	<p>Latar belakang kegiatan media briefing ini adalah karena publik di Indonesia patut tahu isu yang sedang dirundingkan di Durban, apakah relevan dengan isu yang sedang berkembang di Indonesia. Dimana Indonesai termasuk peserta terbanyak.</p> <p>Saat ini kita melakukan conference dari Jakarta, perwakilan masyarakat dayak dari Kalteng (Pak Muliadi dari Yayasan Petak Danum) &amp; Durban (delegasi NGO dari WALHI &amp; KRUHA) – Diana dan Ranti.</p>
	Diana & Ranti	<p>Di hari ke-10 dari pembukaan, banyak yang bilang bahwa sebetulnya perkembangan negosiasi lambat dan ada juga beberapa negara yang semakin tajam menyakatan berulang-ulang di plenary bahwa mereka akan meninggalkan protocol Kyoto (KP).</p> <p>Ada negara yang mendorong kesepakatan baru, meninggalkan KP dengan Durban Minded. Ada juga yang medorong komitmen kedua. Yang meminta ada perjanjian baru adalah AOSIS (negara kepulaun kecil), negara LDC.</p> <p>Jepang, china dan rusia bilang bahwa mereka meninggalkan KP. Bangladesh mendukung amerika karena mereka ingin mendapatkan dukungan pendanaan.</p> <p>-----</p> <p>Sampai sekarang ini yang banyak berkembang tentang financing, termasuk REDD mekanisme financing.</p>

		<p>GCF dana yang akan digunakan oleh sektor privat. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana benefit dana tersebut kepada masyarakat. Bukan negara yang punya independensi penuh, tetapi diserahkan pada privat.</p> <p>Bank dunia posisinya sebagai inter trusty, sedangkan draft teksnya belum jelas apakah ada klausul yang menyatakan bahwa bang dunia sebagai regular trusty.</p> <p>Tidak bisa diterima karena kalau berbicara tentang tanggungjawab adalah diserahkan kepada private. Akan ada pretensi untuk green wash.</p> <p>REDD sempat tidak ada teks tentang safe guard. Sekaraang ada Safe guard information systems, memberikan keleluasaan bagi negara menentukan safe guard sendiri. Akan ada interpretasi yang berbeda, tergantung masing-masing negara.</p> <p>Delegasi Indonesai sedang mencoba bertemu dengan Pak Rahmat untuk melakukan lobi karena belia akan berbicara pada tanggal 8 sore.</p> <p>Di Durban, Indonesia punya pavilion Indonesia yang disponsori oleh APP, Pertamina dan Sinar Mas (notabene mereka adalah penyumbang emisi terbesar di sektor perkebunan dan lahan gambut). Di pavilion Indonesia akan ada Sri Muliani.</p>
	Teguh	Gambarang situasi riil yang terjadi di masyarakat kalteng: dampak yang dirasakan, situasi masyarakat hari ini?
	Muliadi	<p>Belum ada kabar yang jelas dari hasil perjanjian. Masalah di Durban masih pada pendanaan2 yang sektor riilnya belum jelas.</p> <p>Di tingkat komunitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seolah-olah hutan bukan milik masyarakat lagi. Masyarakat diajarkan melakukan penanaman, padahal dari dulu masyarakat sudah menanam.</li> <li>• Hasil2 yang ada di masyarakat sekarang diakui sebagai milik mereka.</li> <li>• Pertanyaannya adalah apakah nantinya masyarakat akan mendapatkan haknya lagi? Misal mengurangi kemiskinan melalui pemberian insentif?</li> </ul> <p>Di tingkat pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bagaiman perbaikan di tingkat ekonomi di masyarakat?</li> <li>• Sektor2 yang terlibat dari perubahan iklim seharusnya melihat kondisi masyarat.</li> </ul> <p>Yang diharapkan adalah jangan sampai mengganggu pola-pola yang ada</p>

		<p>dimasyarakat. Jangan paksakan tanaman2 yang tidak tumbuh di tempat asalnya.</p> <p>Pelaksana harusnya memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat. Masyarakat menolak karena memang belum mengetahui, Belum lagi tentang pembagiannya.</p> <p>Bloking kanal belum bisa langsung dijalankan, karena perlu ada sosialisasi agar mereka paham.</p>
	Teguh	Apakah isu2 ato poin2 yang dibicarakan di Durban menjawab kegelisahan masyarakat Kalteng?
		<p>Pertemuan tersebut tidak menjawab.</p> <p>Belum jelas juga komitmen negara2 utara menurunkan emisi mereka. Jangan2 seolah2 kita ini hanya diminta membersihkan kotoran yang mereka lakukan.</p>
	Teguh	Kalau bagi masyarakat, poin apa yang seharusnya dirundingkan di Durban?
	Muliadi	<p>Ada beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan hak masyarakat pelaksanaan proyek: misal pemerintah</li> <li>2. Masyarakat punya ruang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Harus dihentikan ekspansi sawit yang mengancam hutan yang berdampak pada kemiskinan masyarakat</li> <li>4. Semua pelaksana REDD harus mengakui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan REDD.</li> </ol>
	Diana	Di dalam pavilion indonesia selain ada tempat small workshop juga disediakan sekitar 5 unit play station
	Berry	<p>Setelah mendengar update dari Durban dan di Kalteng. Dimana sampai sekarang ini kita tidak melihat ada hubungan konkrit antara kondisi di lapangan dan di Durban.</p> <p>Kondisinya sangat urgent sekali. Bahwa bumi sudah sangat terancam. Apabila tidak ada upaya penyelamatan konkrit akan terjadi malapetakan yang besar. Terutama Indonesia yang termasuk negara kepulauan dan mempunyai banyak pulau kecil.</p> <p>Akan ada ancaman gagal panen, nelayan tidak bisa melaut. Mestinya dunia melihat fakta ini, sehingga tidak boleh bermain2 dengan konferensi yang sedang diselenggarakan.</p> <p>Melihat kenyataan yang ada, sudah dapat dilihat bahwa dalam pertemuan belum ada perjanjian konkrit untuk penyelamatan bumi. Lebih pada mengakomodir negara2 annex 1 dalam melakukan investasi. Komitmen penyelamatan bumi sangat rendah.</p> <p>Negara maju mengusulkan menunda upaya penurunan gas rumah kaca ditunda sampai dengan tahun 2020. Walaupun negara2 Eropa mengusulkan akan mempersiapkan di tahun 2015 dan akan diimplementasikan pada tahun 2020.</p>

		<p>AS menarik komitmennya 100 miliar dollar untuk negara berkembang. REDD justru lebih banyak mendebatkan tentang pendanaan insiatif REDD tanpa mendiskusikan substansi dasar tentang hak masyarakat wilayahh kelola hutannya. Bagaimana sumber pendanaan bisa didapatkan.</p> <p>Negara berkembang, termasuk Indonesia masih keberatan dengan pendanaan REDD. Dan akan membuka ruang yng besar pada mecanisme market.</p> <p>Ada kelompok yang oposisi yang tergabung dalam AOSIS (terdiri dari 42 negara). Akan menolak seluruh ouutcomes pertemuan Durban apabila tidak ada upaya perlindungan masyarakat. WALHI mendukung aliansi tersebut. Posisi WALHI saat ini: negara penghasil emisi tertinggi tidak boleh menunda waktu untuk mengurangi emisinya. Apabila mereka menepati janji yang sudah disampaikan sudah sangat bagus. (release)</p>
	Yuyun (Koalisi Anti Utang)	<p>Pertanyaannya, di pertemuan Durban apakah ada evaluasi tentang bank dunia sebagai trusty fund berdasarkan kesepakatan Cancun. Sudah ada evaluasikah?</p>
	Diana	<p>Belum ada apapun tentang World Bank. Belum ada inisiatif evaluasi apapun.</p>
	Yuyun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kita lihat bahwa keterlibatan privat sector sangat besar. Yang jadi pertanyaannya adalah dari mana dana untuk penyelamatan bumi ini. Apakah dari public fund? Seharusnya tidak berasal dari sektor swasta</li> <li>2. Hutang program: Tanggal 1 Desember Kementrian Keuangan membatalkan hutang proyek senilai 400jt US dollar untuk proyek pendanaan iklim. – perlu mendapatkan apresiasi.</li> <li>3. Hutang proyek 400jt US dollar untuk clean development mekanisme – perlu ada evaluasi</li> </ol>
	Teguh	<p>KRUHA akan memberikan pandangan urgensi perundingan terhadap krisis air dan pangan dari pertemuan Durban</p>
	Among	<p>Konfirmasi kebenaran kepada Diana, bahwa apakah isu air akan ada pembahasan tersendiri?</p>
	Diana	<p>Hanya ada pembahasan isu air di pavilion Africa, tidak di Indonesia</p>
	Among	<p>Memang benar hanya ada di africa, namun sponsornya adalah perusahaan air besar yang berkoalisi. Usulan pembahasan ini diidorong oleh privat sektor yang pro terhadap investasi air – pendekatan pasar. Misal: pembangunan waduk besar yang akan meminggirkan masyarakat</p> <p>Diana, jika bertemu dengan delegasi Indonesia untuk menanyakan kembali tentang hal ini. Dan apabila Indonesia terlibat diminta untuk menghentikan ataupun menolak agenda tersebut</p>

	Teguh	Kekhawatiran apa?
	Among	Tahun lalu, air sudah diakui bahwa kebutuhan air adalah HAM. Namun disisi lain air sudah menjadi agenda pasar yang sangat besar baik oleh para privat sector ataupun oleh Bank Dunia itu sendiri. Dan dikhawatirkan solusinya adalah solusi pasar – bukan upaya untuk keadilan air secara menyeluruh
	Teguh	Bagaimana sepak terjang Delri? Dokumen tertinggal di bandara?
	Ranti	Pada hari pertama, Di Durban Exhibition Center dimana juga ada stand indonesia tidak ada dokumen. Setelah ditanyakan- Dokumen tertahan di bandara. Namun di hari berikutnya sudah ada dokumen yang ditampilkan di stand tersebut.
	Diana	241 delegasi Indonesia merupakan lima bagian terbesar peserta konferensi. Mereka tidak jelas mau melaksanakan apa di sana karena tidak ada submission yang mereka sampaikan.
	Teguh	Sebagai gambaran, bahwa pada saat pertemuan di Cancun ada 160 delegasi Indonesia, apabila dihitung minimalis maka akan 10 Miliar. Jadi kalau 241 delegasi bisa dibayangkan berapa dana publik yang digunakan untuk mendatangkan delegasi tersebut.
<b>DISKUSI</b>		
	Fifi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja DELRI, sebenarnya posisi Indonesia di KP gimana? Apakah akan lanjut atau akan submisi ide baru?</li> <li>2. REDD window: apakah mereka bisa pus dana dari 30 M sampai 100 M atau gimana?</li> </ol>
	Diana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen DELRI yang dipunya hanya releasae. Belum ada dokumen yang lain. Indonesia akan mendorong KP tapi dalam pelaksanaannya akan dikembalikan ke masing-masing negara.</li> <li>2. REDD window belum ada keputusan sampai sekarang akan seperti apa.</li> </ol>
	Fifi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reference Emission Letter – Apakah Indonesia akan menentukan sendiri baselinenya?</li> <li>2. Tarik ulur KP apakah lebih banyak yang pro atau kontra</li> </ol>
	Teguh	Tergetnya KP harus mendapat keputusan final. Dan mereka akan mendorong KP akan tetap dilaksanakan post tahun 2012. Afriika sudah melakukan perundingan tertutup tentang Green Climate Fund.
	Diana	Info dari Green Climate Fund punya tiga option: bahwa dana yang didapatkan akan dialokasikan 50% untuk adaptasi dan 50% untuk mitigasi.
	Teguh	Rekomendasi mitigasi Green Climate Fund seperti apa?
	Muliadi	Hal yang sangat terlihat sekali adalah masyarakat tidak dapat , mengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi dan monitoring dalam program REDD.  Bank Dunia sudah melakukan banyak kunjungan ke site project namun belum jelas juga tentang bantuan pelaksanaan project, apakah kepada masyarakat atau melalui perantara siapa?

		Pada saat ini APP sangat tertutup kepada pihak-pihak yang akan melaksanakan wawancara. Sehingga masyarakat susah mendapatkan data-data.
	Among	Bagi yang membutuhkan informasi tentang pembahasan isu air bisa membuka website: <a href="http://www.waterclimatecoalition.org">www.waterclimatecoalition.org</a>
	Diana	<p>info tambahan 2:10 PM Negara berkembang maunya reference emission level tergantung masing masing negara</p> <p>2:11 PM Alasannya krn mereka msh tahap membangun</p> <p>2:16 PM Greedy corporate funds</p> <p>2:17 PM Accra Position (HuMa salah satu anggota) Accra Caucus on Forests and Climate Change yang terdiri dari gabungan lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dari negara maju dan berkembang, dengan fokus pada isu kehutanan dalam perubahan iklim, khususnya REDD, berpendapat bahwa teks mengenai REDD+ yang dikeluarkan SBSTA di perundingan Durban ini gagal melindungi hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan dari resiko kerusakan dan pelanggaran HAM.</p> <p>Draft yang saat pada saat ini tidak berhasil menentukan panduan pelaporan untuk safeguard sosial dan lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan REDD+ di negara-negara berkembang. Pesan-pesan para pemimpin dunia dan kelompok bisnis di Durban yang lebih menekankan keuntungan dari pasar karbon membawa resiko yang sangat besar bukan saja pada pengurangan emisi global tapi juga pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang keselamatannya bergantung pada pelaksanaan safeguard dalam skema REDD+.</p> <p>Tanpa adanya panduan pelaporan di tingkat internasional, terutama mengenai partisipasi masyarakat adat dan lokal, resiko bahwa laporan mengenai penegakkan safeguard akan dimonopoli pemerintah terbuka lebar. Selain itu, keputusan ini tidak memberi insentif bagi pemerintah di tingkat nasional untuk melindungi masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan secara lebih baik.</p> <p>Pemerintah Indonesia tidak berperan dalam mendorong pentingnya panduan mengenai pelaporan safeguard di tingkat internasional ini. Ancaman ini semakin besar di tengah semakin dekatnya Indonesia dengan skema pasar karbon yang lebih berorientasi bisnis daripada penyelamatan hutan dan</p>

		pemenuhan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.
--	--	--